

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA 2014

## OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
  - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
  - 1.2 Pengurangan Pengangguran
  - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
  - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
  - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
  - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
  - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
  - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
  - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
  - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
  - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
  - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
  - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
  - 5.1 Isu Strategis Daerah
  - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH



# Perkembangan Pembangunan Provinsi Papua 2014

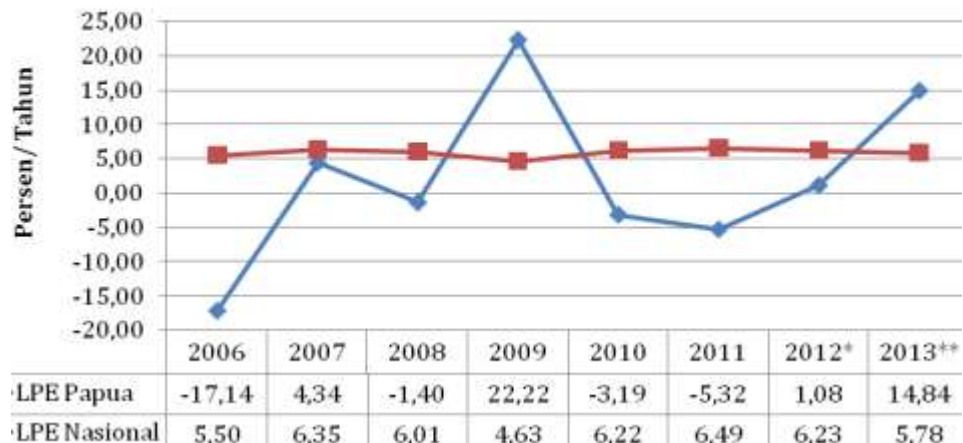
## SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Perkembangan Indikator Utama

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Papua merupakan provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam terutama sektor pertambangan. Sektor pertambangan telah mampu menyumbang lebih dari 50 persen perekonomian di Papua dengan komoditas tembaga, emas, minyak dan gas. Selain sektor pertambangan, kegiatan perekonomian masyarakat dominan pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan. Kinerja perekonomian Provinsi Papua selama kurun waktu 2006-2013 berfluktuatif, dengan laju rata-rata sebesar 1,93 persen. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi di provinsi ini mengalami perlambatan sebesar 17,14 persen, kemudian mencapai laju pertumbuhan tertinggi tahun 2009 sebesar 22,22 persen (Gambar 1). Kinerja perekonomian yang fluktuatif ini dipengaruhi oleh produksi sektor pertambangan dan penggalian yang mendominasi kegiatan perekonomian di wilayah ini. Pada tahun 2013 besarnya kontribusi Provinsi Papua terhadap pembentukan PDRB Wilayah Papua sebesar 65,52 persen, dan menyumbang 1,16 persen terhadap PDB nasional.

Gambar 1  
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000

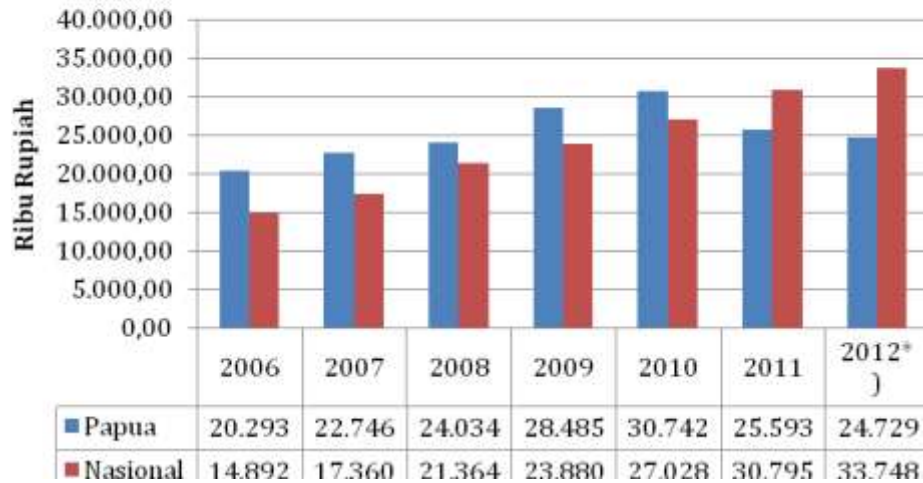


Sumber: BPS, 2013

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Papua selama kurun waktu tahun 2006-2012 cenderung meningkat, menunjukkan kesejahteraan di Provinsi Papua juga meningkat dan relatif baik secara nasional sejak tahun 2009. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB perkapita Papua dan PDB nasional

sebesar 136,27 persen, maka pada tahun 2012 rasionya menurun menjadi 73,86 persen (Gambar 2).

**Gambar 2**  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

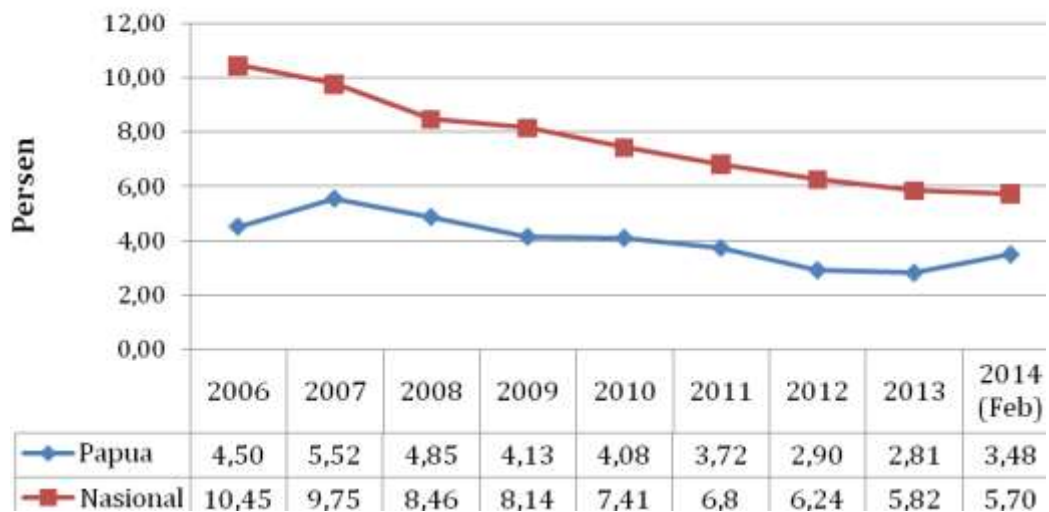


Sumber: BPS, 2013

## 2. Pengurangan Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Papua selama 2006-2013 berkurang sebesar 1,69 persen. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun dan berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional (Gambar 3). Ini menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru di Papua masih mampu diserap oleh lapangan kerja yang tersedia.

**Gambar 3**  
Tingkat Pengangguran Terbuka

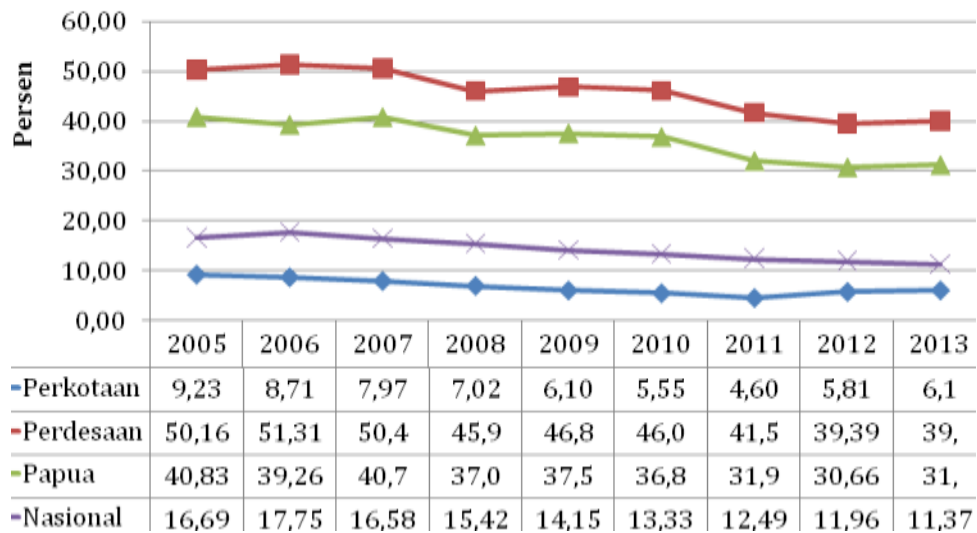


Sumber: BPS, 2014

### 3. Pengurangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi kurang memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Selama kurun waktu 2006-2013 persentase penduduk miskin di provinsi ini berkurang sebesar 8,16 persen dan masih menempati urutan tertinggi secara nasional serta lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional (Gambar 4). Kemiskinan di Papua disebabkan karena kemiskinan struktural, yaitu akibat struktur sosial dalam masyarakat. Masyarakat Papua kurang mampu memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan tingkat pendidikan yang dimiliki

**Gambar 4**  
**Persentase Penduduk Miskin**



Sumber: BPS, 2013

## B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

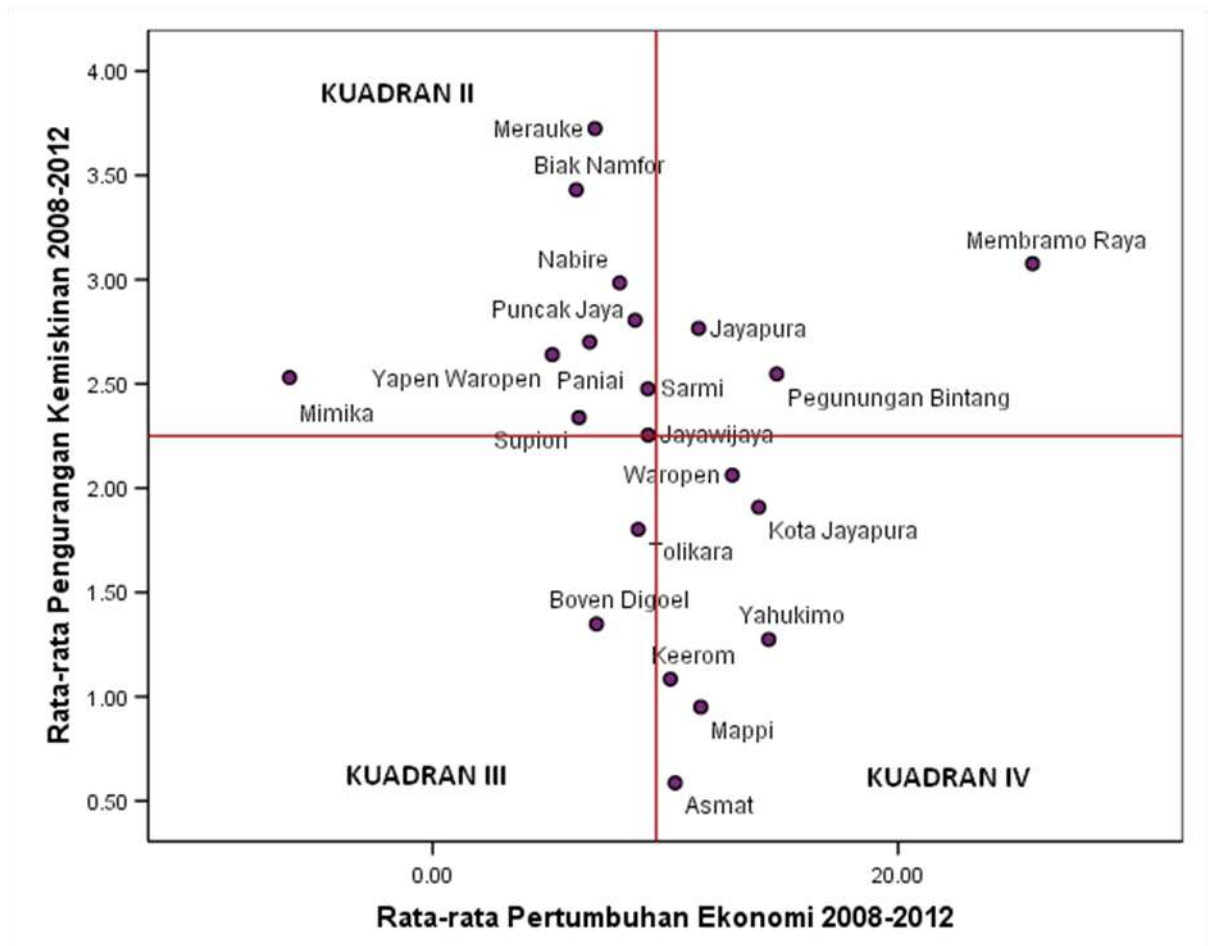
Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , serta perluasan lapangan kerja.

### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Papua menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Membramo Raya, Jayapura, dan Pegunungan Bintang termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kuadran ini dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi

oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

**Gambar 5**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin**  
**Provinsi Papua Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Kedua*, Kabupaten Merauke, Biak Namfor, Nabire, Puncak Jaya, Yapen Waropen, Pniai, Sarmi, Suiori, Jaya Wijaya, dan Mimika terletak di kuadran II yang termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

*Ketiga*, Kabupaten Tolikara dan Boven Digoel terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah

daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

*Keempat*, Kabupaten Waropen, Yahukimo, Keerom, Mappi, Asmat, dan Kota Jayapura terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Papua berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012.

*Pertama*, Kabupaten Membramo Raya, Jayapura, Mappi, Asmat, dan Kota Jayapura terletak di kuadran I, merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

*Kedua*, Kabupaten Jayawijaya, Yapen Waropen, Boven Digoel, dan Merauke yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

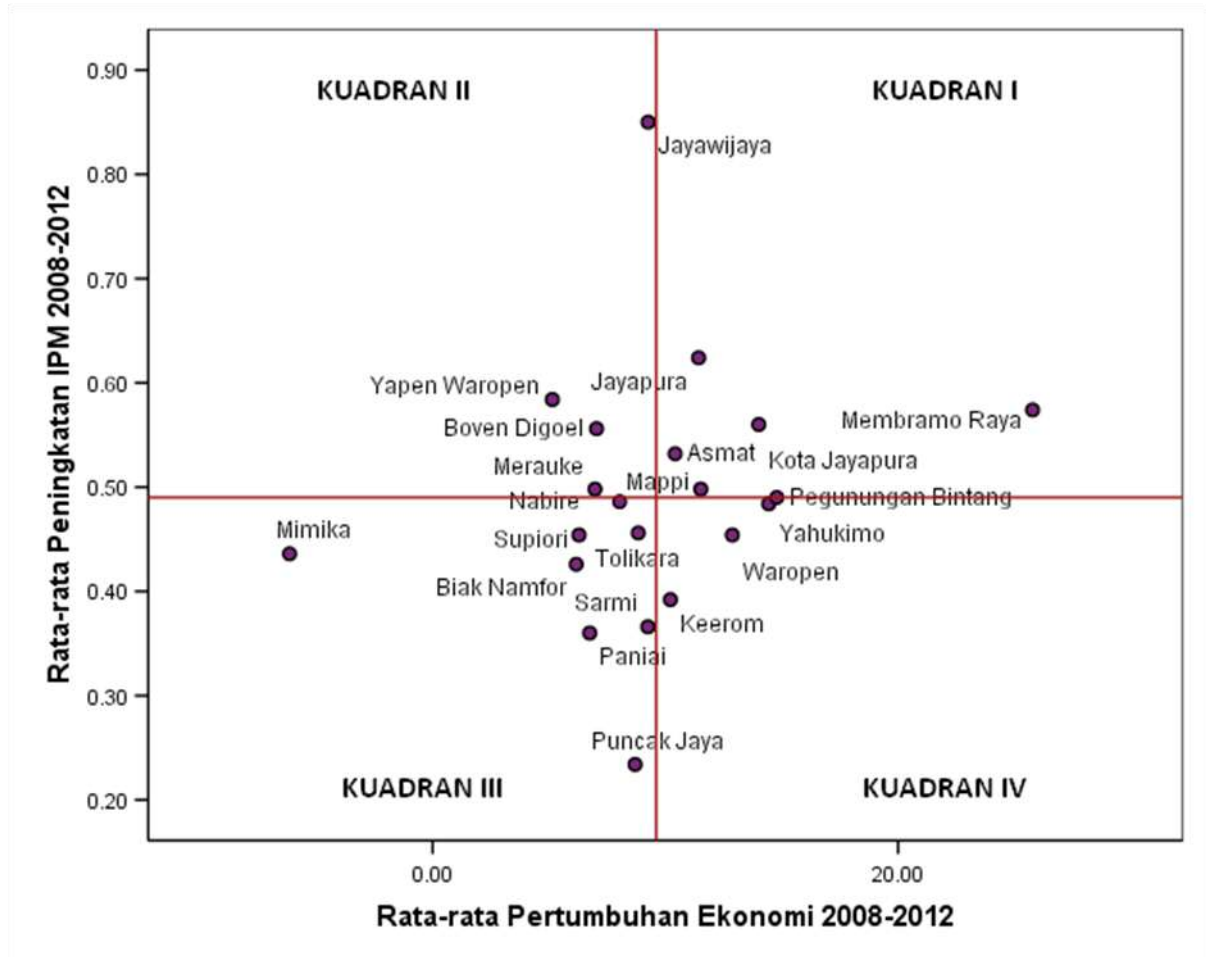
*Ketiga*, Kabupaten Mimika, Nabire, Supiori, Biak Namfor, Tolikara, Sarmi, Paniai, dan Puncak Jaya terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

*Keempat*, Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Waropen, dan Keerom terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan



bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

**Gambar 6**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM**  
**Provinsi Papua Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

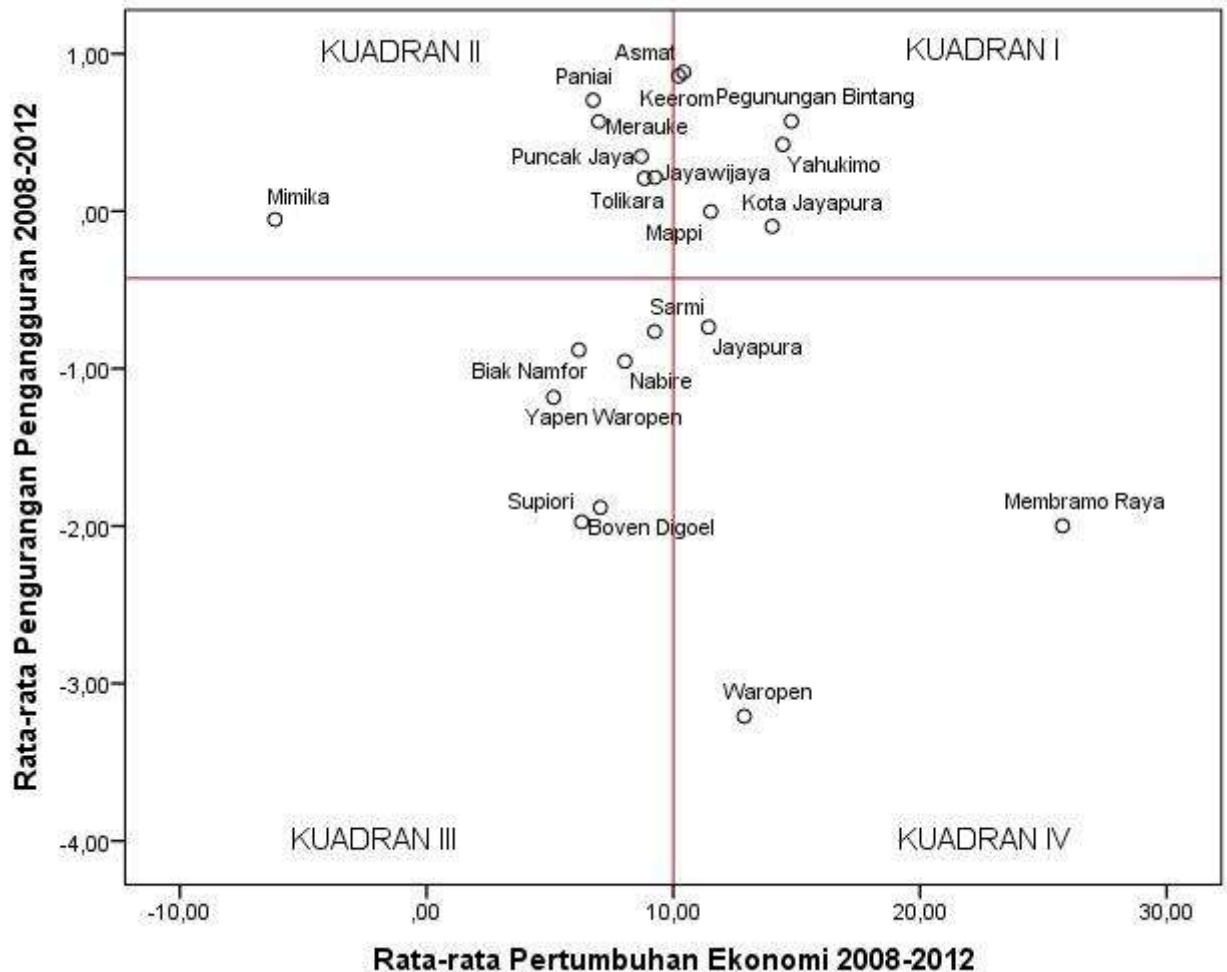
### 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Papua menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Asmat, Pegunungan Bintang, Keerom, Yahukimo, Mappi, dan Kota Jayapura termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.



*Kedua*, Kabupaten Paniai, Merauke, Mimika, Puncak Jaya Tolikara, dan Jayawijaya yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

**Gambar 7**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Provinsi Papua Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Ketiga*, Kabupaten Biak Namfor, Yapen Waropen, Supiori, Sarmi, Nabire, dan Boven Digoel terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

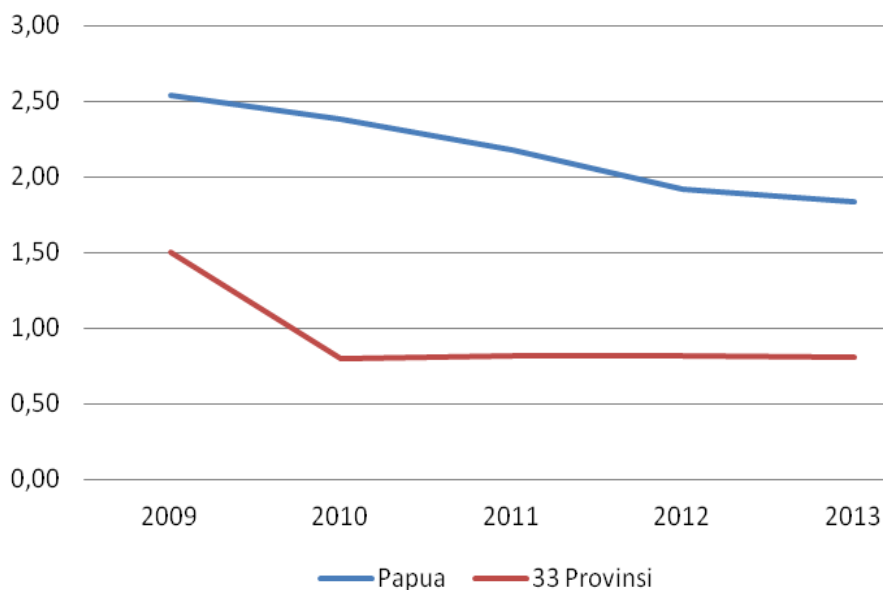
*Keempat*, Kabupaten Jayapura, Membramo Raya, dan Waropen terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

#### 4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Papua yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 cukup tinggi dan berada di atas rata-rata nasional. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Papua tergolong pada kelompok ketimpangan tinggi. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di Provinsi Papua antara lain jarak kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi yang terbatas. Kesenjangan dalam perekonomian menimbulkan disparitas terutama melonjaknya harga barang kebutuhan pokok.

**Gambar 8**  
**Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Papua cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (tabel 1). Pendapatan perkapira di Provinsi Papua relatif lebih tinggi daripada pendapatan perkapita di Provinsi Papua. Wilayah Papua memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah daripada wilayah lain di Indonesia. Konstentrasi penduduk di Papua tersebar di perdesaan dan pedalaman. PDRB perkapita di Kabupaten Mimika tinggi karena keberadaan potensi sumber daya alam di bidang pertambangan, yang

didukung oleh keberadaan perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yang sudah puluhan tahun melakukan penambangan terhadap bijih tembaga, emas, dan perak. Infrastruktur di Mimika terbangun dengan keberadaan kota modern, bandara, pelabuhan, serta fasilitas jalan. Lapangan kerja di Kabupaten Mimika cukup terbuka meskipun tidak menyerap seluruh penduduk lokal.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2007-2012 (000/jiwa)**

<b>Kab. / Kota</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Merauke	12.852	14.278	16.415	18.462	19.549	21.435
Jayawijaya	2.554	2.773	5.167	5.657	6.082	6.242
Jayapura	10.790	12.425	14.643	17.012	18.735	21.399
Nabire	7.540	8.659	12.739	14.069	14.989	16.176
Yapen Waropen	6.733	7.638	8.165	9.104	9.273	9.974
Biak Numfor	9.016	9.929	10.930	12.121	12.622	14.182
Paniai	2.732	3.171	3.280	3.028	3.208	3.290
Puncak Jaya	3.440	4.384	5.706	6.015	6.090	5.886
Mimika	252.610	251.819	302.998	307.153	236.409	200.132
Boven Digoel	18.783	22.233	25.135	27.846	30.486	32.718
Mappi	5.243	6.659	8.254	9.180	10.199	12.032
Asmat	5.037	6.373	6.969	8.031	9.031	10.601
Yahukimo	1.117	1.542	1.960	2.523	2.836	3.494
Pegunungan Bintang	3.561	5.946	7.993	9.757	10.535	11.525
Tolikara	2.912	3.285	3.742	4.322	4.643	4.438
Sarmi	14.366	16.876	19.167	21.614	24.522	27.669
Keerom	11.136	12.633	14.909	17.161	18.834	20.795
Waropen	6.904	8.030	9.718	11.969	14.219	17.358
Supiori	17.548	19.919	21.627	23.507	24.343	26.083
Mamberamo Raya	6.729	8.180	11.106	14.938	20.086	24.571
Nduga	-	-	1.536	2.914	2.496	2.826
Lanny Jaya	-	-	1.605	1.963	2.750	3.244
Mamberamo tengah	-	-	2.778	3.747	5.042	6.407
Yalimo	-	-	2.137	1.836	3.736	4.263
Puncak	-	-	4.179	5.028	6.055	7.378
Dogiyai	-	-	5.365	6.423	7.114	7.681
Intan Jaya	-	-	-	4.578	5.763	3.773
Deiyai	-	-	-	3.627	4.290	4.157
Kota Jayapura	16.944	21.012	25.904	29.123	33.376	39.303
<b>PAPUA</b>	<b>22.747</b>	<b>23.985</b>	<b>28.486</b>	<b>30.743</b>	<b>25.594</b>	<b>24.730</b>

Sumber: BPS, 2013

Perusahaan pendukung kegiatan pertambangan juga bermunculan di Mimika sehingga aktivitas ekonomi di wilayah ini semakin berkembang dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Seluruh lapangan pekerjaan yang digerakkan penduduk lokal maupun pendatang menghasilkan perputaran uang yang cukup besar. Hal ini bukan

hanya menjadikan pendapatan per kapita Kabupaten Mimika tinggi, namun juga memberi kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.

### C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

#### 1. Tingginya Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertambangan)

Penambangan PT Freeport Indonesia di Provinsi Papua menarik banyak pekerja pada kegiatan operasional penambangan ataupun usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pertambangan. Sebagai perusahaan tambang terbesar di Papua, perusahaan ini mempekerjakan sekitar 7.600 karyawan. Dari jumlah tersebut, 26 persen merupakan penduduk lokal Papua. Kondisi sumber daya manusia Papua yang kurang memiliki keterampilan dan pendidikan untuk bekerja menggunakan teknologi modern menjadi kendalanya. Kinerja sektor pertambangan dan penggalian merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Naik turunnya produksi PT. Freeport Indonesia sangat menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Struktur perekonomian Provinsi Papua tahun 2013 didominasi oleh kontribusi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 48,80, sektor pertanian sebesar 11,99 persen, dan sektor konstruksi sebesar 11,90 persen (Tabel 2). Peranan sektor industri pengolahan hanya memberikan kontribusi sebesar 1,69 persen, dan merupakan kontributor kedua terendah setelah sektor listrik Gas dan air minum sebesar 0,17 persen.

**Tabel 2**  
**Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	11,99	17,38
2.	Pertambangan	48,80	32,05
3.	Industri Pengolahan	1,69	2,50
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,17	0,25
5.	Konstruksi	11,90	11,82
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	6,56	9,10
7.	Angkutan, Telekomunikasi	6,19	9,23
8.	Keuangan	3,06	4,35
9.	Jasa-jasa	9,64	13,32
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Apabila ditelusuri lebih lanjut berdasarkan analisis sektor basis, sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor-sektor *tradable* (dapat diperdagangkan antardaerah), dengan nilai *location quotient* lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ). Hal ini menunjukkan Provinsi Papua memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor-sektor tersebut (Tabel 3).

**Tabel 3**  
**Nilai LQ Sektor Ekonomi Provinsi Papua**

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan</b>	1,32	1,13	1,25	1,42	1,49
a. Tanaman Bahan Makanan	1,32	1,12	1,23	1,42	1,47
b. Tanaman Perkebunan	0,40	0,36	0,40	0,46	0,50
c. Peternakan	0,70	0,63	0,70	0,82	0,88
d. Kehutanan	3,11	2,69	3,05	3,41	3,56
e. Perikanan	2,07	1,77	1,92	2,10	2,25
<b>2. Pertambangan dan Penggalian</b>	5,47	6,01	5,23	4,33	3,85
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	16,13	16,75	14,05	11,33	9,51
c. Penggalian	0,73	0,65	0,76	0,90	0,97
<b>3. Industri Pengolahan</b>	0,10	0,09	0,10	0,11	0,11
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,10	0,09	0,11	0,12	0,12
<b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih</b>	0,34	0,27	0,30	0,33	0,35
a. Listrik	0,37	0,31	0,35	0,38	0,40
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	0,69	0,61	0,63	0,74	0,81
<b>5. Konstruksi</b>	1,22	1,12	1,41	1,74	2,00
<b>6. Perdagangan, Hotel &amp; Restoran</b>	0,41	0,39	0,43	0,49	0,52
a. Perdagangan Besar dan Eceran	0,44	0,42	0,46	0,52	0,56
b. Hotel	0,59	0,53	0,62	0,71	0,74
c. Restoran	0,18	0,16	0,18	0,21	0,23
<b>7. Pengangkutan dan Komunikasi</b>	0,89	0,75	0,83	0,92	0,96
a. Pengangkutan	1,07	0,96	1,08	1,24	1,34
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	0,87	0,78	0,89	1,02	1,08
3). Angkutan Laut	1,92	1,82	2,17	2,63	2,83
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	1,00	0,89	0,98	1,09	1,15
5). Angkutan Udara	2,02	1,74	1,80	1,96	2,11
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,35	0,31	0,36	0,42	0,47
b. Komunikasi	0,75	0,61	0,67	0,72	0,75
<b>8. Keuangan, Real Estate &amp; Jasa Perusahaan</b>	0,29	0,34	0,37	0,42	0,44
a. Bank	0,41	0,55	0,59	0,65	0,67
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,29	0,31	0,35	0,41	0,43
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Real Estat	0,24	0,23	0,28	0,34	0,36
e. Jasa Perusahaan	0,08	0,07	0,08	0,09	0,10

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>9. Jasa-jasa</b>	0,99	0,94	1,12	1,32	1,42
a. Pemerintahan Umum	2,05	1,98	2,40	2,87	3,20
b. Swasta	0,16	0,15	0,17	0,19	0,21
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,29	0,26	0,30	0,34	0,36
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,63	0,55	0,64	0,76	0,81
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,06	0,05	0,06	0,07	0,08

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Beberapa indikator di atas menekankan pentingnya pengembangan sektor pertanian yang menjadi tumpuan sebagian tenaga kerja di wilayah Provinsi Papua, serta pengembangan sektor industri pengolahan non migas. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. *Pertama*, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain dan menciptakan lapangan kerja.

Selama periode 2011-2014, perubahan orang bekerja di sektor pertanian dan perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan peningkatan tertinggi, sementara orang bekerja di sektor pertambangan, industri pengolahan, dan jasa-jasa cenderung menurun (Tabel 4). Di sisi lain kekuatan perekonomian di Papua bergantung pada pertambangan sampai berakhirnya kontrak karya perusahaan pertambangan dengan pemerintah Indonesia. Ke depan, sektor industri pengolahan non migas masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian dan sektor perdagangan dengan status informal yang kurang produktif.

**Tabel 4**  
**Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2011-2014**

No.	Lapangan Pekerjaan	2011	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	1.092.878	1.197.105	104.227
2	Pertambangan	14.790	9.712	-5.078
3	Industri Pengolahan	24.645	12.929	-11.716
4	Listrik, Gas, Air	2.391	1.150	-1.241
5	Bangunan	29.812	38.883	9.071
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	118.183	146.072	27.889
7	Angkutan & Telekomunikasi	42.288	54.073	11.785
8	Keuangan	13.002	17.106	4.104
9	Jasa-Jasa	160.465	153.189	-7.276
<b>Total</b>		<b>1.498.454</b>	<b>1.630.219</b>	<b>131.765</b>

Sumber: BPS, 2014

## 2. Kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama 2006-2013 adalah pada ekspor impor (Tabel 5). Peningkatan penjualan komoditas pertambangan dari PT Freeport Indonesia menjadi pendorong utama peningkatan ekspor di Provinsi Papua. Jika terjadi penurunan produksi, hal ini tentunya akan berdampak langsung terhadap kinerja ekspor impor dan mempengaruhi perekonomian daerah. Perekonomian daerah memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekspor impor produk pertambangan (Tabel 5). Besarnya kontribusi nilai impor, ekspor, dan konsumsi rumah tangga mendominasi struktur perekonomian Papua, sedangkan investasi (PMTB) yang sangat penting bagi pertumbuhan daerah kontribusinya berada di bawah ketiga sektor tersebut. Investasi berperan meningkatkan stok kapital di daerah yang digunakan untuk memproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi.

**Tabel 5**  
**PDRB Menurut Penggunaan 2013**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	57,40	34,60
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	1,68	21,59
3.	Konsumsi Pemerintah	26,08	10,06
4.	PMTB	37,44	19,89
5.	Perubahan Stok	-12,17	21,59
6.	Ekspor	48,43	21,59
7.	Impor	58,86	29,33
	Total	100,00	100,00

*Sumber : BPS, 2013*

Sejalan dengan kebijakan percepatan pembangunan di Papua, kegiatan investasi perlu ditingkatkan dengan mengembangkan potensi wilayah, meliputi sumber daya alam dengan kandungan minyak dan gas, kandungan mineral logam, sumber daya hutan dan perairan, pengembangan pertanian dan agribisnis, serta potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Pencapaian nilai tambah pada komponen investasi diantaranya dipengaruhi oleh pembenahan sarana infrastruktur, pengurusan perizinan usaha, kepastian hukum dan kondisi keamanan suatu daerah.

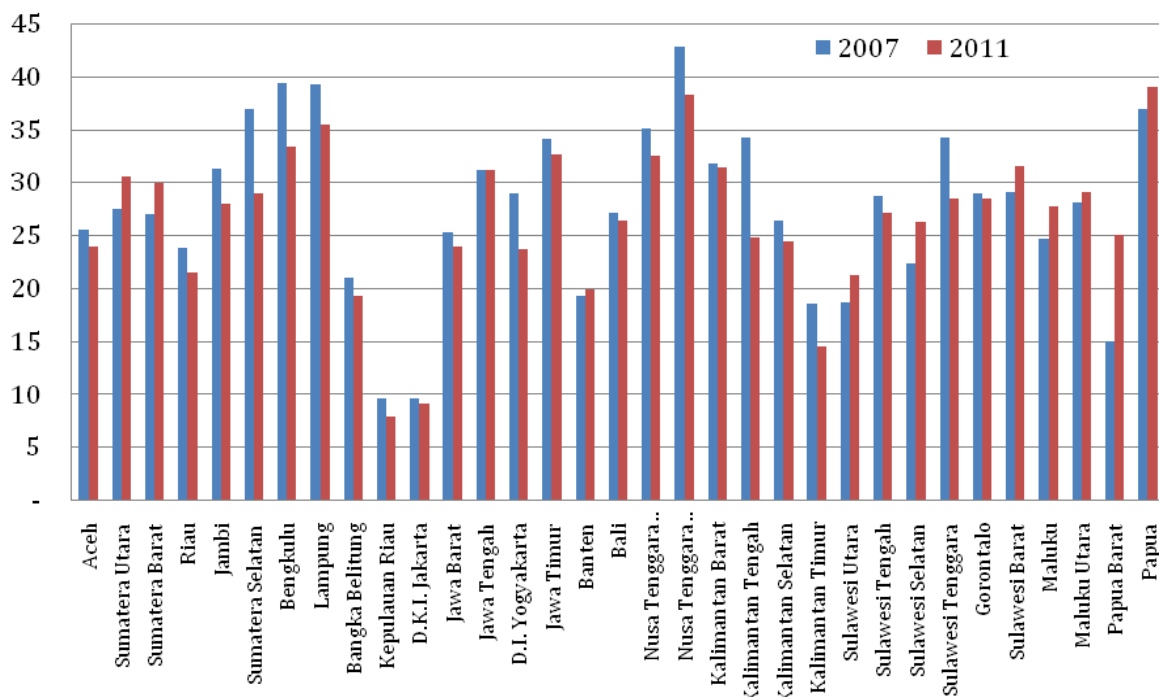
## 3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja

Kualitas lapangan kerja ditunjukkan dari banyaknya pekerja yang bekerja di sektor informal. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi. Porsi pekerjaan kurang berkualitas di Papua meningkat dari tahun 2007 dan mencapai 39 persen pada tahun 2011 (Gambar 9). Tingginya persentase pekerjaan kurang berkualitas di



Papua dikarenakan banyaknya pekerja di sektor informal pertambangan yang berasal dari penduduk lokal Papua. Kondisi sumber daya manusia ini terkendala oleh kurang dimilikinya ketrampilan dan pendidikan untuk bekerja menggunakan teknologi. Rendahnya kualitas pekerjaan yang tersedia di daerah juga terkendala oleh besarnya jumlah pekerja bebas di sektor pertanian dan sektor lain, serta banyaknya pekerja yang tidak dibayar. Kebijakan pembangunan sektor pertanian harus sejalan dengan kebijakan pembangunan di sektor industri karena rendahnya produktivitas pertanian. Pengembangan industri dapat diarahkan pada industri berbasis pertanian dalam arti luas, seperti agroindustri yang didukung oleh agrobisnis.

**Gambar 9**  
**Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas**



Sumber: BPS, 2012

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja adalah dengan memperluas kesempatan kerja formal, memperlancar perpindahan pekerja dari pekerjaan yang produktivitasnya rendah ke pekerjaan yang produktivitasnya tinggi, dan mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja yang masih berada di sektor informal dan mempersempit kesenjangan upah pada tingkat produktivitas yang sama.

#### 4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Keberadaan infratsruktur seperti jalan raya dan jembatan akan mampu membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan

meningkatkan nilai tambah perekonomian. Provinsi Papua memiliki wilayah sangat luas dengan kepadatan penduduk rendah dan dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 16.149 km. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Kerapatan jalan yang menunjukkan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Provinsi Papua tergolong rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia (Tabel 6).

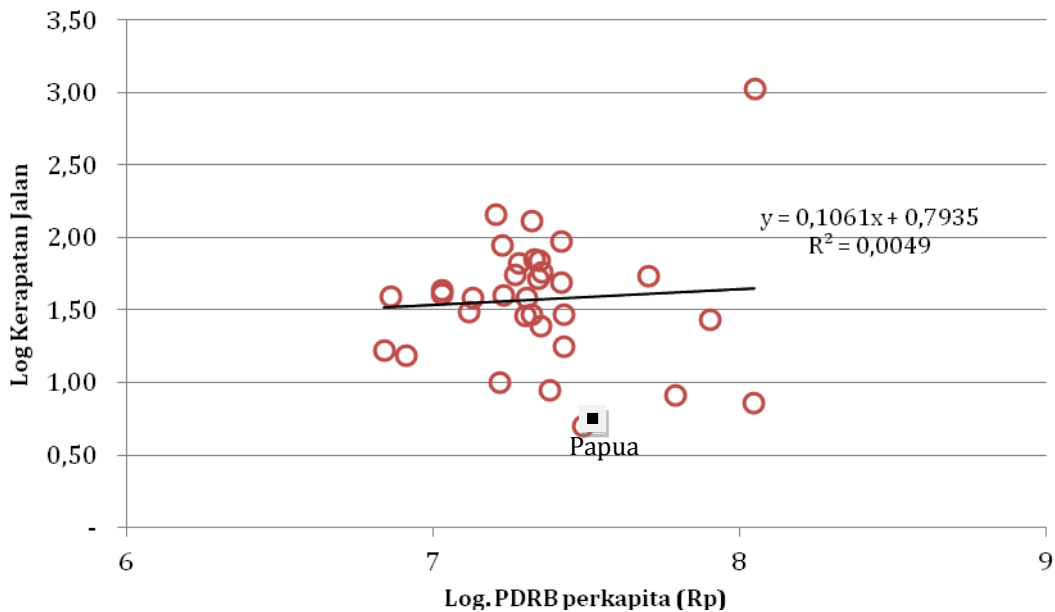
**Tabel 6**  
**Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012**

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
<b>33</b>	<b>Papua</b>	<b>30.713</b>	<b>5,06</b>
	<b>Indonesia</b>	<b>33.531</b>	<b>25,99</b>

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Berdasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Papua relatif tidak lebih baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dengan pendapatan perkapita tinggi, posisi Papua mengalami defisiensi infrastruktur jalan.

**Gambar 10**  
**Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012**



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Papua relatif baik, ditunjukkan dari panjang jalan yang sudah beraspal di provinsi ini. Permukaan jalan beraspal di Papua sudah mencapai di atas 50 persen pada tahun 2012 (Tabel 7), menunjukkan daya dukung jalan untuk pergerakan barang relatif baik. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah.

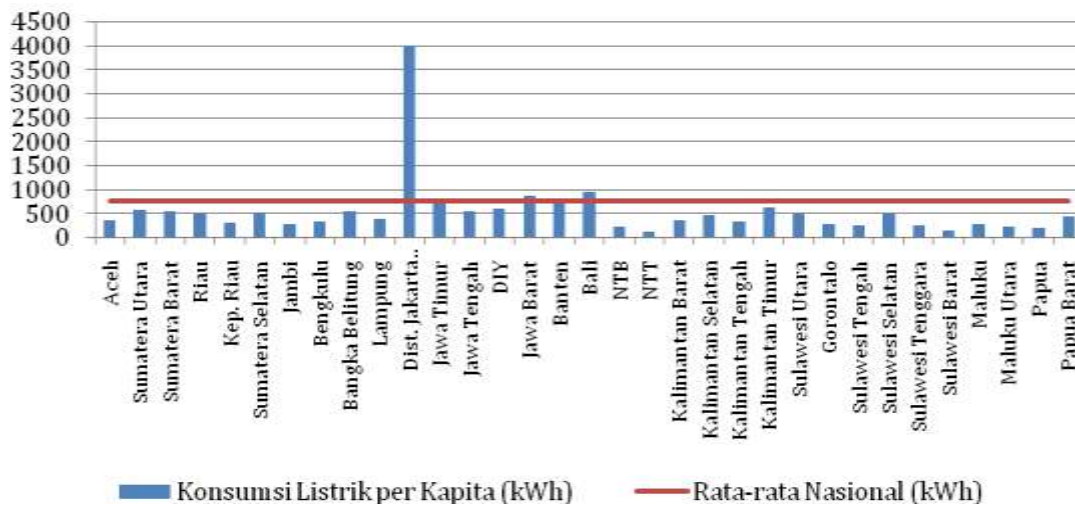
**Tabel 7**  
**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012**

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Papua	1.523	81	201	11	140	8	9	0	1.873	100
Wilayah Papua	2.586	81	341	11	239	8	13	0	3.179	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: : BPS, 2012

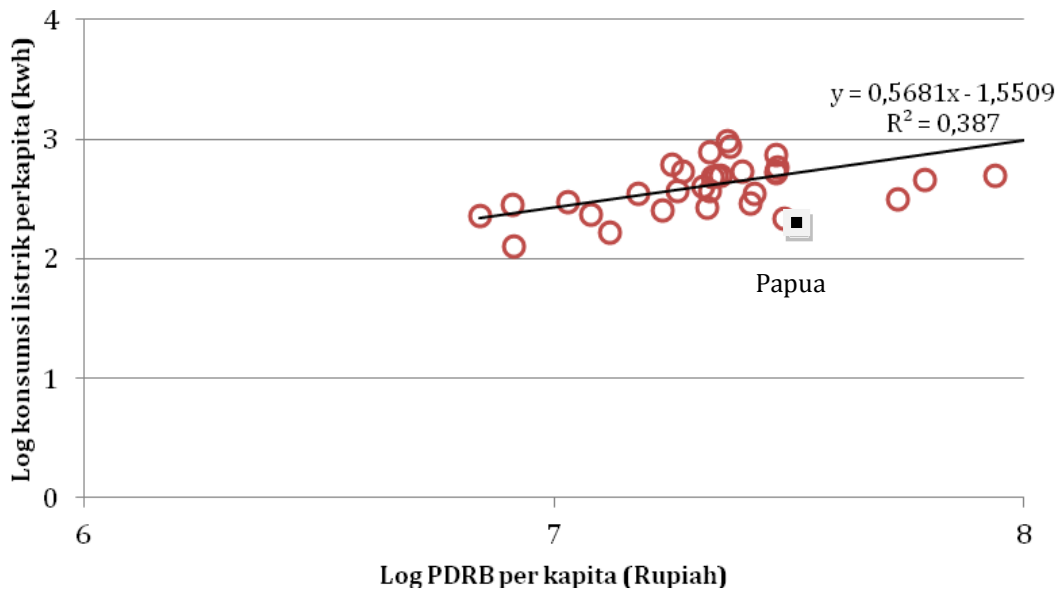
Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Papua termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik.

**Gambar 11**  
**Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013**



Sumber: Statistik PLN, 2013

**Gambar 12**  
**Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013**



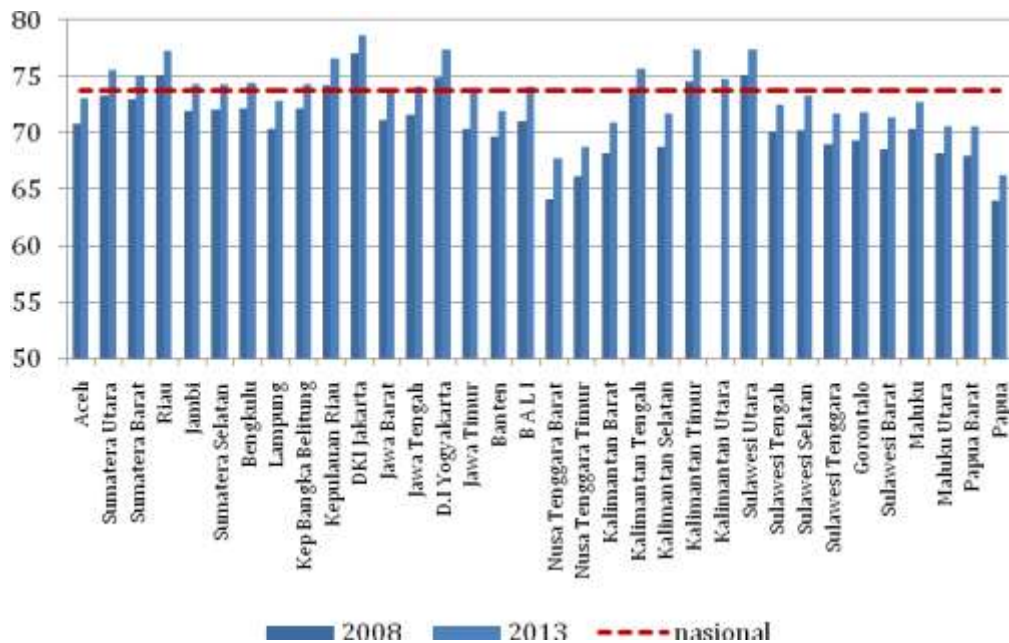
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu perekonomian, konsumsi listriknya cenderung semakin tinggi pula. Posisi Papua berada di bawah kurva linier, menunjukkan konsumsi listrik Papua jauh lebih rendah dari di provinsi lain yang memiliki pendapatan perkapita sama. Dengan demikian, ketersediaan jaringan listrik merupakan salah satu masalah di Papua.

### 5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Papua yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 namun masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13). Nilai IPM di Papua ini juga selalu lebih rendah daripada Papua Barat. Rendahnya nilai IPM di Papua sejalan dengan rendahnya tingkat kemiskinan di provinsi ini. Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan tingginya nilai pendapatan perkapita Provinsi Papua, yang menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah Provinsi Papua masih berjalan eksklusif dan tidak merata.

**Gambar 13**  
**Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013**



Sumber: BPS, 2013

IPM Papua merupakan IPM terendah secara nasional pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 66,25. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari angka 68,10 tahun pada tahun 2008 menjadi 69,13 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Papua meningkat dari 6,52 tahun pada 2008 menjadi 6,87 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Papua pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 75,41 menjadi 75,92 persen, jauh dari capaian nasional maupun Papua Barat sebesar 94,14 persen.

**Tabel 8**  
**Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan**

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014	Perubahan
1	≤ SD	725.089	1.055.047	329.958
2	SMP	128.243	224.644	96.401
3	SMTA Umum	165.285	285.554	120.269
5	Diploma I/II/III/Akademi	24.278	40.534	16.256
6	Universitas	32.319	83.251	50.932
<b>Total</b>		<b>1.075.214</b>	<b>1.689.030</b>	<b>613.816</b>

Sumber: BPS, 2014

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja di Papua dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 20,64 persen pada tahun 2008 menjadi 24,24 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Angkatan kerja dengan pendidikan SD dan SMP masih mendominasi angkatan kerja di Papua dan

selalu menunjukkan peningkatan yang besar. Perbaikan kualitas angkatan kerja merupakan modal berharga untuk mendukung industrialisasi berbasis sumber daya alam setempat.

## 6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi.

Rasio pinjaman terhadap simpanan di Papua nilainya lebih kecil dari satu, menunjukkan rendahnya posisi pinjaman dibandingkan simpanan. Hal ini juga berarti kegiatan investasi di Papua ditentukan oleh simpanan masyarakat. Rasio tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0.92 (Tabel 9).

**Tabel 9**  
**Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013**

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Papua	28.682	18.850	0,71	
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

Sumber: BPS, 2014

Rasio PMTB terhadap simpanan di Papua nilainya menunjukkan tingginya investasi fisik di daerah. Investasi fisik ini diperkirakan lebih fokus pada pengembangan industri migas di wilayah ini. PMTB biasa disebut investasi fisik karena dihitung dari penanaman modal yang benar-benar menghasilkan nilai tambah dan bukan dihitung dari realisasi penanaman modal yang tercatat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

## 7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

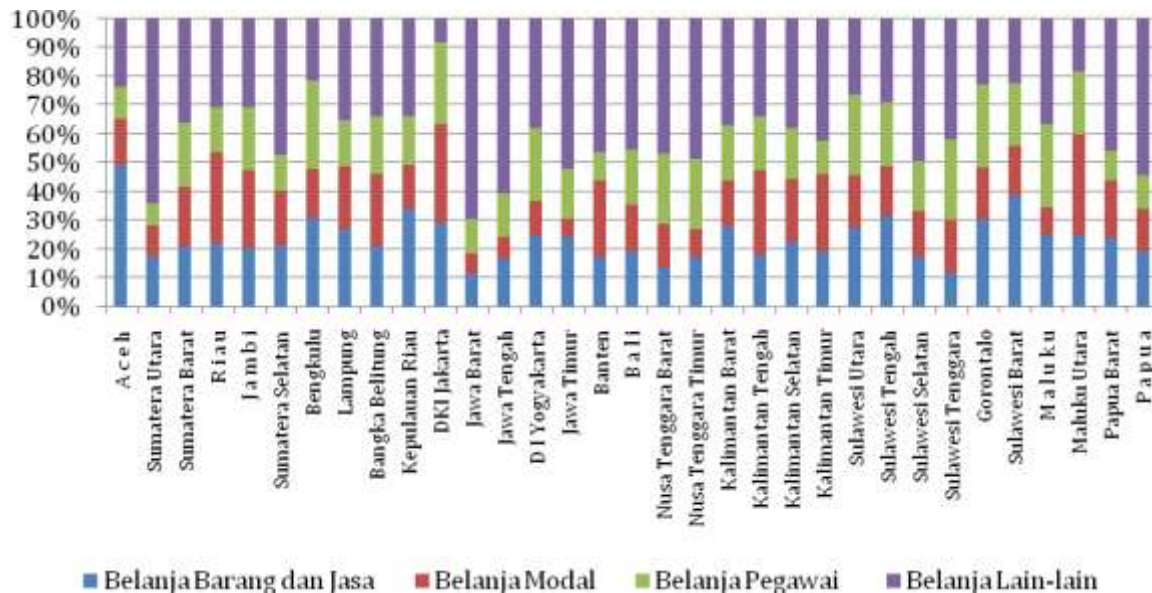
Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable* dan atau *non rivalry* memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumberdaya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Papua. Rasio belanja modal di Papua pada tahun 2013 sebesar 14,74 persen, dan rasio belanja pegawai sebesar 11,80 (Gambar 14). Kondisi ini belum cukup memacu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,



khususnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah perlu melakukan upaya pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan SDM secara tepat dan berkelanjutan, dengan abkasi alokasi anggaran yang memadai.

**Gambar 14**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013**



Sumber: BPS, 2013

Dana Otonomi Khusus Wilayah Pulau Papua tahun 2014 mencapai sebesar 6,82 trilyun rupiah, yang terbagi secara proporsional masing-masing 70% untuk Provinsi Papua dan 30% untuk Provinsi Papua Barat. Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai belanja dan pembangunan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Daerah yang mencakup pembangunan infrastruktur, pembangunan sektoral, belanja modal dan belanja rutin dalam memacu pembangunan di wilayah Pulau Papua. Dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua sebesar 2 trilyun rupiah. Efektivitas dari belanja pembangunan tersebut perlu lebih ditingkatkan, sehingga dapat berdampak nyata terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah Papua.

#### D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Perkembangan perekonomian di Papua secara makro relatif baik meskipun belum diikuti perkembangan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Papua (indeks gini) selama periode 2008-2013 mengalami sedikit peningkatan dari angka 0,40 menjadi 0,44, lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,4 pada tahun 2013. Kesenjangan output antarkabupaten/kota di Papua tergolong tinggi secara nasional sehingga kurang mendukung dalam menjaga stabilitas perekonomian wilayah.

Percepatan pengembangan ekonomi Papua diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Manfaat dari proyek-proyek

infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan diperkirakan tak hanya memberi manfaat kota bersangkutan tetapi juga wilayah sekitarnya. Namun demikian hal ini sangat bergantung pada aksesibilitas di dalam wilayah Provinsi Papua (Timika, Jayapura, dan Merauke), serta konektivitasnya dengan Provinsi Papua Barat (Kota Sorong dan Manokwari).

Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, prospek pembangunan Provinsi Papua Tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Papua dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 14,1 – 17,7 persen dimungkinkan dapat tercapai dengan meningkatkan optimalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki daerah, sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2015 prospek pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia akan terus menguat dibandingkan tahun 2014. Prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik di wilayah ini terutama karena dukungan kinerja ekonomi Wilayah Papua seiring dengan membaiknya kinerja sektor pertambangan dan industri pengolahan. Produsen utama tembaga di Papua akan berproduksi secara normal kembali sehingga meningkatkan PDRB wilayah.
2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Papua harus dilakukan dengan optimal agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 30,9 – 21,5 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Papua sebesar 31,13 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Papua harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 9,63 poin persentase atau 1,61 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Papua akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Papua maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah, antara lain melalui transmisi perdagangan komoditas ekspor sektor kehutanan dan perikanan.

## **E. Penutup**

### **1. Isu Strategis Daerah**

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- b. Peningkatan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan;
- c. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berbasis masyarakat;

- d. Pengembangan lapangan kerja berkualitas;
- e. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan interkoneksi antardaerah;
- f. Peningkatan daya tarik investasi pada sektor pangan, perkebunan, dan industri pengolahan non migas;
- g. Peningkatan suplai daya listrik;
- h. Menjaga stabilitas keamanan.

## **2. Rekomendasi Kebijakan**

Penanganan isu-isu di atas diperkirakan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:

- a. Peningkatan pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat
- b. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- c. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses input produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi;
- d. Peningkatan pelayanan sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan;
- e. Peningkatan kemudahan perijinan usaha khususnya pada sektor pertanian dan industri pengolahan;
- f. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur dan pengembangan pertanian yang menjadi kewenangan daerah, dan pembangunan SDM.
- g. Pembangunan jaringan jalan dan perbaikan kualitas jalan;
- h. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
- i. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: pengendalian inflasi daerah dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah;
- j. Peningkatan harmonisasi antar pekerja dan perusahaan.

